



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu kewajiban perangkat daerah di Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja pada Unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kerja Utama dan Sasaran Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Revisi RENSTRA yang selaras dengan Revisi RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja serta sebagai umpan balik dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja serta sebagai umpan balik dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Pekanbaru, Februari 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751001 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Organisasi	2
E. Kondisi Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis (Renstra)	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA	13
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA	15
C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN KEGIATAN	22
BAB IV PENUTUP	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 merupakan instrument pertanggungjawaban dalam pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama menjalankan tugasnya “mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program sekretariat, perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan evaluasi APBD Kab/Kota, Akuntansi dan Penganggaran daerah, anggaran daerah bawahan, akuntansi dan pelaporan, anggaran daerah, administrasi dan analisa kebutuhan aset, pengadaan dan pemeliharaan aset”.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 melaksanakan 41 (empat puluh satu) kegiatan dalam 8 (delapan) program untuk mencapai sasaran-sasaran strategis. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut disediakan anggaran sebesar Rp.31.155.967.250,00,- (Tiga puluh satu milyar seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari dana APBD. Capaian kinerja selama tahun 2017 menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mencapai rata-rata realisasi keuangan sebesar 89,85 % dan realisasi fisik sebesar 99,72 %.

Adapun kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2017 ini, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang mendatang. Berbagai langkah akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017, merupakan salah satu kewajiban Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKAD Provinsi Riau.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 92).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan LkjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Revisi Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di tahun mendatang.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

II. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan Program;
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penerimaan Daerah;
2. Subbidang Belanja Daerah;
3. Subbidang Pengelola Kas Daerah.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

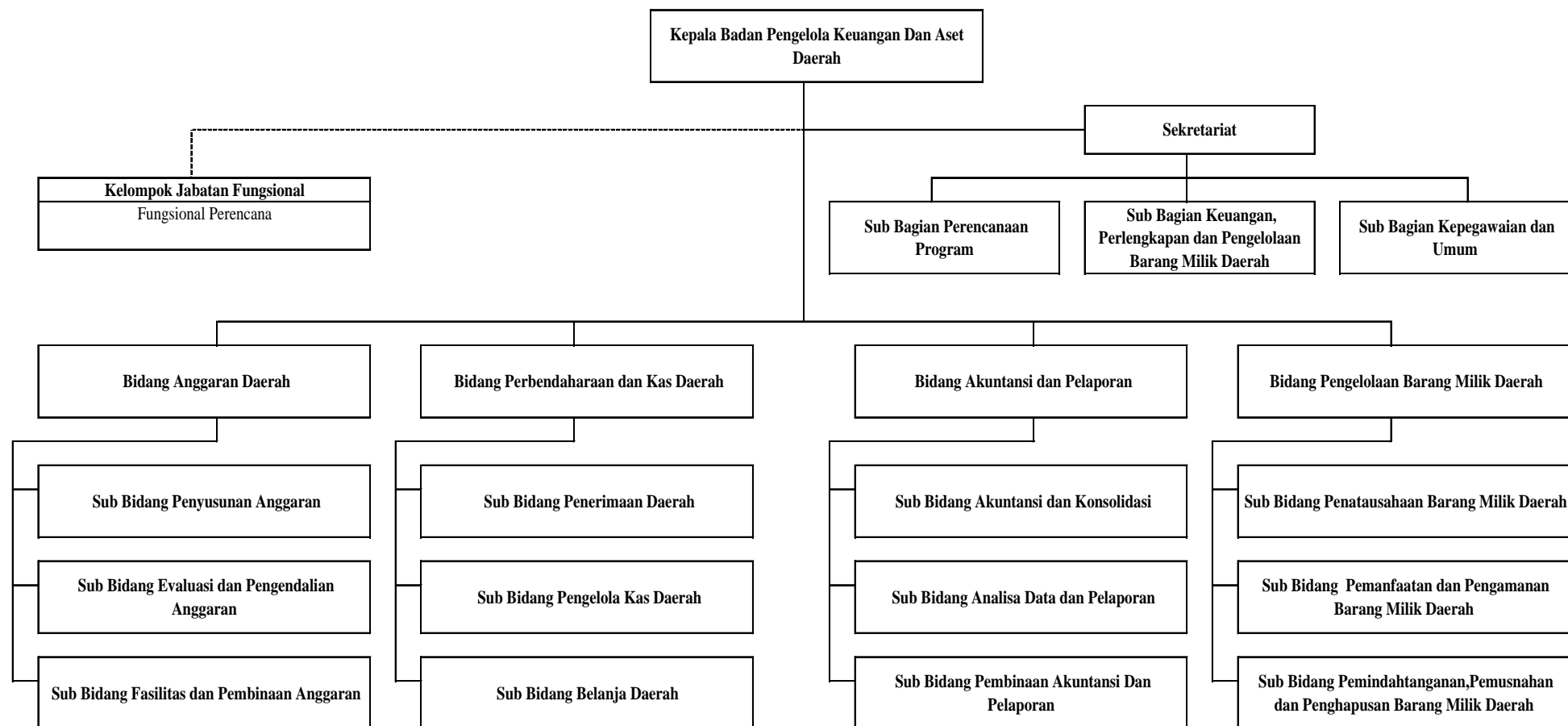
1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- 3 Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016

E. Kondisi Strategis

1. Eksternal

Dari kondisi yang ada, maka diidentifikasi Rencana Strategis ke depan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Secara umum aspek strategis organisasi yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

- a) Tuntutan perkembangan regulasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan segala permasalahan yang semakin kompleks membutuhkan kesiapan SDM dalam aktifitas perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pemeriksaan, serta tuntutan ganti rugi keuangan/barang daerah.
- b) Akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan.
- c) Semangat inovatif penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus berkembang melalui pembelajaran yang berkesinambungan (*learning organization*) serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- d) Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki sumbangan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- e) Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah harus cepat bertransformasi seiring dengan perubahan regulasi-regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Internal

Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1**Data ASN BPKAD Provinsi Riau berdasarkan Jabatan Tahun 2017**

STRUKTURAL			FUNGSIONAL		JUMLAH
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Perencana	Umum	
1	5	15	1	90	112

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017

Tabel 1.2**Data ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017**

NO	GOLONGAN/ PANGKAT	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	7	1	1	1	10
2	III	19	33	20	13	85
3	II	4	4	4	5	17
4	I	0	0	0	0	0
JUMLAH						112

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017

Tabel 1.3**Data ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017**

No.	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	%
1	Sarjana S2	24	0
2	Sarjana S1/D-IV	62	12
3	Diploma/D-III	7	57
4	SLTA (Sederajat)	15	0
5	SLTP (Sederajat)	-	12
6	SD (Sederajat)	2	0
JUMLAH		112	100

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2017

BAB II

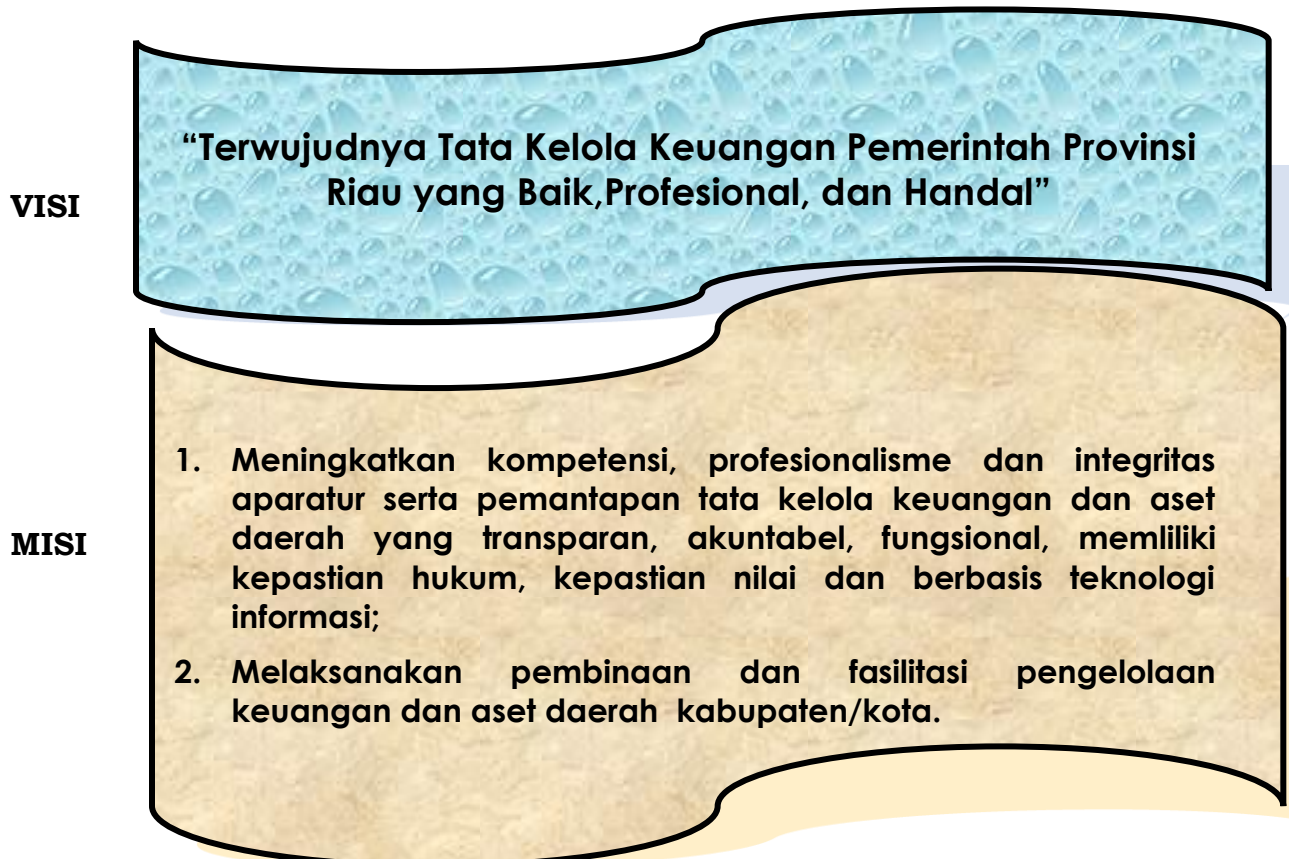
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan startegis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. **784 / XI / 2014** tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya yang menjadi acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi



TUJUAN

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau;
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab/Kota

SASARAN

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab/Kota yang berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah melakukan identifikasi dan penyelarasan terhadap Indikator Kinerja tahunan dalam dokumen Revisi Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Indikator Kinerja:

- ❖ Persentase kualitas penyusunan APBD/APBD-P sesuai ketentuan yang berlaku
- ❖ Persentase kualitas penatausahaan APBD/P sesuai ketentuan yang berlaku
- ❖ Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- ❖ Persentase Laporan Keuangan Provinsi Riau sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- ❖ Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Pedoman Evaluasi Permendagri

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau

Indikator Kinerja:

- ❖ Persentase Kab/Kota yang Pengelolaan Keuangan dan Asetnya baik

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- ✓ Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✓ Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- ✓ Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- ✓ Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2017 yang berisi 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang diwujudkan pada tahun 2017. Indikator kinerja tersebut telah mencakup indikator kinerja utama (IKU) untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : **Kpts. 865/XII/2014**, dan indikator lainnya yang relevan dengan sasaran program yang akan dicapai. Rincian

indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Kesesuaian Penyusunan KUA PPAS/KUPA dan Perubahan PPAS dengan RKPD	100%
2	Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda APBD/P dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/P	100%
4	Jumlah peserta sosialisasi dari OPD Provinsi Riau	40 OPD
5	Jumlah peserta sosialisasi dari Kab/Kota	12 Kab/Kota
6	Jumlah paket regulasi yang tersusun	2 Regulasi
7	Persentase Ketersediaan Kas Daerah dalam pelaksanaan APBD/P Provinsi Riau	100%
8	Persentase Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid	26 OPD
9	Persentase SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%
10	Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan	- 41 OPD - 12 Kab/Kota 6 Provinsi
11	Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu	40 OPD
12	Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100%
13	Persentase Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan	100%
14	Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan	100%
15	Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%
16	Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	- 40 Lokasi - 40 lokasi - 40 Lokasi
17	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	100%
18	Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
19	Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
20	Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
21	Persentase Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
22	Persentase Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
23	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD konsisten dengan Perda APBD/APBD-P	100%
24	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan LHP BPK	100%
25	Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi	2 aplikasi
26	Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya berkualitas	12 Kab/Kota
27	Persentase Kab/Kota yang Laporan Keuangan sesuai SAP	12 Kab/Kota
28	Persentase Kab/Kota yang Pelaksanaan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	12 Kab/Kota

Untuk mewujudkan kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.967.571.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.033.901.715,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	925.544.000,00
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	602.872.600,00
6	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	22.716.823.935,00
7	Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.116.172.000,00
8	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	768.082.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 serta perbandingannya dengan pencapaian tahun sebelumnya

A. CAPAIAN KINERJA

Sampai dengan akhir tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. Tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Penyusunan KUA PPAS/KUPA dan Perubahan PPAS dengan RKPD	100%	100%	100%
		Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda APBD/P dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/P	100%	100%	100%
		Jumlah peserta sosialisasi dari OPD Provinsi Riau	40 OPD	34 OPD	80 %
		Jumlah peserta sosialisasi dari Kab/Kota	12 Kab/Kota	11 Kab/kota	91,67%
		Jumlah paket regulasi yang tersusun	2 Regulasi	3 Regulasi	150 %
		Persentase Ketersediaan Kas Daerah dalam pelaksanaan APBD/P Provinsi Riau	100%	99,82%	99,82%
		Persentase Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid	100% (26 OPD)	100% (26 OPD)	100%
		Persentase SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan	100% - 41 OPD - 12 Kab/Kota - 6 Provinsi	95,12% - 35 Opd - 12 Kab/kota - 6 Provinsi	95,12%
		Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu	100% (40 OPD)	75% (30 OPD)	75%
		Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100% (93 Usulan BMD)	91,4% (85 BMD)	91,4%
		Persentase Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan	100%	63%	63%
		Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan	100%	0%	0%
		Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	60%	60%
		Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100% - 40 Lokasi - 40 lokasi - 40 Lokasi	45,83 % - 65 lokasi - 2 Lokasi - 3 Lokasi	45,83 %
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	100% (40 OPD)	100% (40 OPD)	100%
		Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
		Persentase Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
		Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD konsisten dengan Perda APBD/APBD-P	100%	100%	100%
		Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan LHP BPK	100%	100%	100%
		Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi	2 aplikasi	2 Aplikasi	100%
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota yang Berkualitas	Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya berkualitas	100% (12 Kab/Kota)	83% (10 Kab/Kota)	83%
		Persentase Kab/Kota yang Laporan Keuangan sesuai SAP	100% (12 Kab/Kota)	100% (12 Kab/Kota)	100%
		Persentase Kab/Kota yang Pelaksanaan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	100% (12 Kab/Kota)	100% (12 Kab/Kota)	100%

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan (target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisa ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

SASARAN 1 : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 25 (Dua Puluh Lima) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Kesesuaian Penyusunan KUA PPAS/KUPA dan Perubahan PPAS dengan RKPD	100%	100%	100%
2	Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan	100%	100%	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda APBD/P dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/P	100%	100%	100%
4	Jumlah peserta sosialisasi dari OPD Provinsi Riau	40 OPD	34 OPD	80 %
5	Jumlah peserta sosialisasi dari Kab/Kota	12 Kab/Kota	11 Kab/kota	91,67%
6	Jumlah paket regulasi yang tersusun	2 Regulasi	3 Regulasi	150 %
7	Persentase Ketersediaan Kas Daerah dalam pelaksanaan APBD/P Provinsi Riau	100%	99,82%	99,82%
8	Persentase Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid	100% (26 OPD)	26 OPD	100%
9	Persentase SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%
10	Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan	100% - 41 OPD - 12 Kab/Kota - 6 Provinsi	- 35 Opd - 12 Kab/kota 6 Provinsi	95,12%
11	Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu	100% (40 OPD)	30 OPD	75%
12	Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100% (93 Usulan BMD)	85 BMD	91,4%
13	Persentase Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan	100%	63%	63%
14	Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan	100%	0%	0%
15	Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	60%	60%
16	Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	100% - 40 Lokasi - 40 lokasi - 40 Lokasi	- 65 lokasi - 2 Lokasi - 3 Lokasi	45,83 %
17	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	100% (40 OPD)	40 OPD	100%
18	Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
19	Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
20	Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
21	Persentase Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
22	Persentase Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%
23	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD konsisten dengan Perda APBD/APBD-P	100%	100%	100%

24	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan LHP BPK	100%	100%	100%
25	Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi	2 aplikasi	2 Aplikasi	100%
Rata-rata capaian (%)				90,07%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas adalah 90,07%. Pencapaian rata-rata indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori amat baik. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel 3.2 diatas masih ada beberapa indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 25 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Penyusunan KUA PPAS/KUPA dan Perubahan PPAS dengan RKPD adalah sebesar 100% hal ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dimana penyusunan KUA PPAS/KUPA harus berpedoman pada RKPD.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyusunan RKA/P dan DPA/P sesuai dengan regulasi yang ditetapkan adalah sebesar 100%, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun RKA/P dan DPA/P sesuai dengan format pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perda APBD/P dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/P adalah sebesar 100%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Penetapan Perda APBD paling lambat akhir

Desember (31 Desember)serta Penjabaran APBD dan penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PERDA ditetapkan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 ditetapkan pada Tanggal 28 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan pada Tanggal 29 Desember 2017.

4. Capaian Indikator KinerjaJumlah peserta sosialisasi mengenai Regulasi-Regulasi Keuangan dari OPD Provinsi Riau dengan capaian 80% (34 OPD) dari 40 OPD, berarti ada peserta dari 6 OPD yang tidak mengikuti sosialisasi yang telah dilaksanakan.
5. Capaian Indikator KinerjaJumlah peserta sosialisasi mengenai Regulasi-Regulasi Keuangandari Kab/Kota sebesar 91,67% (11Kab/Kota) dari 12 Kab/Kota. Dengan demikian masih ada peserta dari 1 Kab/Kota yang tidak menghadiri sosialisasi yang telah dilaksanakan.
6. Capaian Indikator KinerjaJumlah paket regulasi mengenai keuangan Provinsi Riau yang tersusun sebanyak 3 Regulasi dari 2 Regulasi yang ditargetkan, berarti capaian indikator kinerjanya sebesar 150%. Regulasi yang telah disusun adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
 - b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
7. Capaian Indikator KinerjaPersentase Ketersediaan Kas Daerah dalam pelaksanaan APBD/P Provinsi Riau tidak mencapai 100% dikarenakanadanya keterlambatan dana transfer, sehingga capaian indikator kinerja APBD/P Provinsi Riau adalah sebesar 99,82%.
8. Capaian Indikator KinerjaPersentase Laporan Penerimaan dari SKPD penghasil yang Valid dari 26 OPD yang ditargetkan sebagai SKPD penghasil telah dapat direalisasikan sebesar 26 OPD dengan capaian

100%.

9. Capaian Indikator Kinerja Persentase SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tepat waktu adalah 100%, hal ini sesuai dengan formulasi jumlah SP2D yang diterbitkan dibanding dengan jumlah SPM yang diajukan.
10. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penatausahaan BMD OPD sesuai ketentuan adalah sebesar 95,12% dengan formulasi realisasi penilaiannya 3 indikator penilaian yaitu penyelesaian laporan BMD OPD, penatausahaan BMD di 12 Kab/Kota dan penatausahaan BMD Provinsi Riau pada 6 Provinsi di Indonesia.
11. Capaian Indikator Kinerja Persentase RKBMD OPD yang disusun tepat waktu sebesar 75% dengan realisasi 30 OPD. Capaian ini diukur dengan formulasi ketepatan waktu penyampaian RKBMD ke pengelola aset Provinsi Riau.
12. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan BMD sesuai ketentuan sebesar 91,4%, dapat dijabarkan dari 93 usulan pemanfaatan BMD telah direalisasikan sebanyak 85 pemanfaatan BMD.
13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan sebesar 63%. Target pemindahtanganan BMD Provinsi Riau pada tahun 2017 sebanyak 30 BMD, sedangkan yang telah direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 19 BMD, dengan demikian pencapaian indikator kinerja Pemindahantanganan BMD tidak mencapai 100% sebagaimana target yang telah ditetapkan.
14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemusnahan BMD sesuai ketentuan belum dapat terlaksana sesuai yang ditargetkan dikarenakan masih dalam proses administrasi penghapusan BMD.
15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penghapusan BMD sesuai ketentuan sebesar 60% dari 5 BMD yang diusulkan untuk dihapuskan, dapat direalisasikan sebanyak 3 BMD.
16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan sebesar 45,83% dengan formulasi realisasi penilaiannya 3 indikator penilaian yaitu jumlah lokasi plang yang dipasang, jumlah lokasi pemagaran dan jumlah lokasi pembersihan. Dari 40 lokasi pemasangan plang, 40 lokasi pemagaran dan 40 lokasi pembersihan yang ditargetkan dapat direalisasikan sebanyak 65 lokasi pemasangan plang, 2 lokasi pemagaran dan 3 lokasi pembersihan dengan capaian 45,83%.

17. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menyelesaikan laporan tepat waktu sebanyak 40 OPD dari 40 OPD yang ditargetkan.
18. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 100%. Persentase laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai sebanyak 40 OPD dari 40 OPD yang telah ditargetkan.
19. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 100%. Persentase Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah mencapai indikator sebesar 100%.
20. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 100% telah mencapai target capaian indikator untuk Kinerja Persentase Laporan Operasional (LO) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
21. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah mencapai target indikator yang telah ditetapkan yaitu 100%.
22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 100% telah memenuhi target indikator Kinerja Persentase Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
23. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD konsisten dengan Perda APBD/APBD-P sebesar 100% telah mencapai target indikator yaitu 1 Ranperda.
24. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan LHP BPK sebesar 100% telah mencapai target indikator yaitu 1 Ranperda.
25. Capaian Indikator Kinerja Jumlah aplikasi SIKD yang terintegrasi adalah sebesar 100%. Aplikasi terintegrasi yang telah ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 2 aplikasi yaitu Aplikasi Modul Aset dengan Aplikasi SIPKD Penatausahaan dan Aplikasi RKPD Online dengan SIPKD Modul Anggaran.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya berkualitas	100%	10 Kab/Kota	83%
2	Persentase Kab/Kota yang Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	12 Kab/Kota	100%
3	Persentase Kab/Kota yang Pelaksanaan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu	100%	12 Kab/Kota	100%
Rata-rata capaian (%)				94,33%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka Peningkatan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau adalah 94,33%. Pencapaian rata-rata indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori amat baik.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel 3.3 diatas masih ada 1 indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 3 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang Penyusunan Anggarannya berkualitas sebesar 83%. Capaian ini diperoleh dari 12 kab/kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan anggaran, terdapat 10 Kab/Kota yang telah melaksanakan pembinaan dan evaluasi Ranperda APBD sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang Laporan Keuangan sesuai SAP sebesar 100%, dari 12 Kab/Kota yang dibina, terdapat 12

Kab/Kota yang laporan keuangan akuntansi pemerintah.

3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang Pelaksanaan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu sebesar 100% dari 12 Kab/Kota yang dibina, terdapat 12 Kab/Kota yang Pelaksanaan Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu.

C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN KEGIATAN

Pada tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memperoleh alokasi anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp.31.155.967.250,00,- (Tiga puluh satu milyar seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Anggaran ini di alokasi untuk 8 (delapan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, secara keseluruhan realisasi fisik dan keuangan tahun anggaran 2017 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran BPKAD	: Rp. 31.155.967.250,00,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 27.992.396.902,00,- (89,85 %)
Realisasi Fisik	: Rp. 31.068.730.541,70,- (99,72 %)
Sisa Anggaran	: Rp. 3.163.570.348,00,- (10,15%)

Dari realisasi yang tercapai pada tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, untuk lebih jelasnya realisasi keuangan dan fisik ini dapat dilihat secara lebih rinci sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. Adapun sasaran Program dan Kegiatan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Sasaran pertama adalah Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang mana dalam pencapaian target didukung oleh beberapa Program yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan : 3 (tiga) kegiatan
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah :18 (delapan belas) kegiatan
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : 1 (satu) kegiatan
4. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : 1 (satu) kegiatan

Seperti yang tergambar dalam daftar dibawah ini. Adapun realisasi keuangan dan fisik pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 925.544.000,00,- (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 70,62 % dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 100%, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Realisasi Keuangan dan Fisik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	925.544.000,00	572.924.400,00	70,62	100,00	352.619.600,00	38,10
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	48.316.000,00	35.417.500,00	73,30	100,00	12.898.500,00	26,70
2	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	660.403.000,00	352.944.100,00	53,44	100,00	307.458.900,00	46,56
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	216.825.000,00	184.562.800,00	85,12	100,00	32.262.200,00	14,88

Realisasi keuangan dan fisik pada program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.453.081.435,00,- (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 89,68 % dan untuk pencapaian realisasi

fisik adalah sebesar 99,43 %, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Realisasi Keuangan dan Fisik Program Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	22.716.823.935,00	20.443.892.862,00	89,68	99,43	2.272.931.073,00	10,01
1	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	361.215.650,00	326.991.400,00	90,53	100,00	34.224.250,00	9,47
2	Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	3.063.850.000,00	2.922.768.860,00	95,40	100,00	141.081.140,00	4,60
3	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah	427.479.300,00	387.993.845,00	90,76	100,00	39.485.455,00	9,24
4	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	415.387.000,00	411.624.493,00	99,09	100,00	3.762.507,00	0,91
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD.	1.978.059.950,00	1.605.772.075,00	81,18	100,00	372.287.875,00	18,82
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.	1.840.134.950,00	1.549.856.700,00	84,23	100,00	290.278.250,00	15,77
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	661.602.400,00	558.029.777,00	84,35	100,00	103.572.623,00	15,65
8	Penyediaan Tenaga Akuntansi, Supervisi Dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan	4.004.311.000,00	3.831.500.123,00	95,68	100,00	172.810.877,00	4,32
9	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD	2.993.492.000,00	2.837.472.023,00	94,79	100,00	156.019.977,00	5,21
10	Penyusunan, Desiminasi, Dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	387.421.600,00	350.835.600,00	90,56	100,00	36.586.000,00	9,44
11	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	321.421.500,00	304.350.100,00	94,69	100,00	17.071.400,00	5,31
12	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5.000.000,00	4.998.800,00	99,98	100,00	1.200,00	0,02
13	Pengamanan Aset Milik Daerah	1.408.475.835,00	1.328.350.380,00	94,31	100,00	80.125.455,00	5,69
14	Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau	760.015.250,00	698.319.250,00	91,88	98,00	61.696.000,00	8,12
15	Pemeliharaan Aset Provinsi Riau	1.255.006.000,00	982.087.593,00	78,25	100,00	272.918.407,00	21,75
16	Inventarisasi Data Aset Daerah	1.170.253.000,00	1.065.370.908,00	91,04	100,00	104.882.092,00	8,96
17	Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	1.066.342.000,00	745.986.000,00	69,96	90,00	320.356.000,00	30,04
18	Bimbingan Teknis Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah	333.614.000,00	306.767.000,00	91,95	100,00	26.847.000,00	8,05
19	Penyusunan Laporan Keuangan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	263.742.500,00	224.817.935,00	85,24	100,00	38.924.565,00	14,76

Realisasi keuangan dan fisik pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 768.082.000,00,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 95,97 % dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 100 %, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Realisasi Keuangan dan Fisik Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	768.082.000,00	737.116.300,00	95,97	100,00	30.965.700,00	4,03
1	Pelaksanaan Operasional Penertiban, Pengawasan Internal Dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau	768.082.000,00	737.116.300,00	95,97	100,00	30.965.700,00	4,03

Realisasi keuangan dan fisik pada program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 602.872.600,00,- (Enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 68,64 % dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 100 %, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Realisasi Keuangan dan Fisik Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	602.872.600,00	413.816.200,00	68,64	100,00	189.056.400,00	31,36

1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	602.872.600,00	413.816.200,00	68,64	100,00	189.056.400,00	31,36
---	---	----------------	----------------	-------	--------	----------------	-------

SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau dengan dukungan program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan. Pada sasaran kedua ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.379.914.500,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 89,79 % dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 100,00%, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Realisasi Keuangan dan Fisik Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.379.914.500,00	1.249.711.235,00	89,79	100,00	130.203.265,00	9,44
1	Evaluasi Ranperda Tentang Apbd Kabupaten/kota Dan Ranperda Tentang Perubahan Apbd Kabupaten/kota.	481.261.000,00	451.238.421,00	93,76	100,00	30.022.579,00	6,24
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	634.911.000,00	573.654.879,00	90,35	100,00	61.256.121,00	9,65
3	Penyusunan Laporan Keuangan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/kota	263.742.500,00	224.817.935,00	85,24	100,00	38.924.565,00	14,76

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2017 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum pencapaian sasaran startegis melalui program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2017 telah berhasil dengan baik, Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

1. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
3. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

1. Masih ada OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang belum mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan.
2. Masih ada Kab/Kota yang belum mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan.
3. Masih ada proses administrasi yang membutuhkan waktu lebih lama
4. Belum ditetapkannya Standar Operasional Prosedur dalam Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah (BMD).

5. Proses Penghapusan Belum Berjalan Dengan Baik. Salah satu sebab kurang baiknya Laporan Barang Milik Daerah adalah, banyaknya selisih antara jumlah barang di buku dengan jumlah barang yang sebenarnya/ yang ada.
6. Masih Terbatasnya Pengawasan dan pengendalian oleh APIP sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

Adanya OPD yang menyampaikan laporan melewati tanggal batas akhir pelaporan.